



Pengarusutamaan Gender dalam Program Pembangunan

Waston Malau*

Program Studi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Diterima Oktober 2014; Disetujui November 2014; Dipublikasikan Desember 2014

Abstrak

Berbagai isu ketidakadilan gender di masyarakat masih belum mendapat perhatian nyata dari semua komponen masyarakat. Wanita lebih banyak mengalami ketidakberuntungan dibandingkan dengan pria dalam bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti yang bisa dilihat bahwa masih kerap terjadi kekerasan terhadap perempuan, perdagangan perempuan dan anak, pornografi, tenaga kerja perempuan seperti problem buruh migran dan TKW di luar negeri, rendahnya partisipasi perempuan bidang politik, dan di bidang pendidikan terutama pada level SMA dan perguruan tinggi. Untuk itu harus terus menerus dilakukan upaya menghapus diskriminasi gender dan pengembangan potensi yang dapat mendukung kesetaraan dan keadilan gender. Meskipun dalam UUD 45 negara telah menjamin kesetaraan akses perempuan dan laki-laki, namun di dalam penerapannya masih mengalami banyak hambatan. Budaya *patriarki* yang sebagian besar masih dianut oleh masyarakat Indonesia turut melanggengkannya. Oleh karena itu, peningkatan peranan wanita dalam pembangunan yang berwawasan gender sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, mempunyai arti penting dalam upaya untuk mewujudkan kemitrasejajaran yang harmonis antara pria dengan wanita atau mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Kata Kunci : Gender, Pembangunan, Pengarusutamaan, Program

Abstract

Many issues of gender inequality surrounding us still not yet seriously solved by all elements of society. Women have more experience in disadvantages rather than men in the fields of education, health, employment, having and using science and technology. As may be seen with the still frequently occur violence against women, trafficking of women and children, pornography, the employment of women as problems of migrant workers and migrant workers abroad, lower participation of women in politics, and in the field of education, especially at the senior high school and higher education. For solving that, efforts in eradicating gender discrimination and developing potency which can support gender equality must be conducted continuously. Despite Constitution of 1945 ensures equality between men and women in accessing the fields, but in application still faced by many obstacles, for instance culture of patriarchy still remained and perpetuated by most of Indonesian people. Therefore increasing the women's role in gender-based development as integral part of national development, has important meaning as effort to realize harmonious equal partnership between men and women, which in other word, to realize gender equity and equality in various fields of life and development.

Keywords: Gender, Development, Mainstreaming, Program

How to Cite: Malau, W. (2014). Pengarusutamaan Gender dalam Program Pembangunan. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 6 (2): 125-131

*Corresponding author:
E-mail: wastonmalau@gmail.com

PENDAHULUAN

Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, teknologi, kelembagaan dan budaya, yang dilaksanakan secara terencana dan terarah. Artinya, ini semua mencakup segala sendi kehidupan sebuah negara yang menuju kepada kemajuan. Kemajuan-kemajuan yang tentu saja dilaksanakan dengan terencana dan terarah melalui proses bertahap. Seperti yang diungkapkan oleh Kartasasmita (1997) bahwa pembangunan adalah proses perubahan ke arah kondisi yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Pada awalnya program pembangunan yang dijalankan di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Ternyata strategi pembangunan yang demikian ini tidak memberikan hasil yang memuaskan terutama karena terlalu memusatkan perhatian pada pembangunan aspek fisik tetapi melupakan pembangunan aspek manusia. Hal inilah yang menyebabkan munculnya paradigma baru dalam strategi pembangunan yang disebut *people centered development*, artinya manusia (rakyat) merupakan tujuan utama dari pembangunan. (Kartasasmita, 1996) Penempatan manusia sebagai subjek dan objek pembangunan menekankan pentingnya pemberdayaan (*empowerment*) manusia, yaitu kemampuan manusia dalam mengaktualisasikan segala potensinya.

Kedudukan manusia dalam proses pembangunan adalah sebagai subjek dan sekaligus sebagai objek dari pembangunan. Dengan demikian pria dan wanita mempunyai kedudukan dan peranan yang sama dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan menikmati hasil pembangunan dalam berbagai bidang. Jadi berdasarkan kondisi normatifnya maka pria dan wanita mempunyai kedudukan dan peranan yang sama, tetapi bila dilihat dalam kondisi objektifnya terlihat bahwa wanita mengalami ketertinggalan yang lebih besar dari pria dalam berbagai bidang kehidupan dan

pembangunan. Hal ini tentu memunculkan pertanyaan: "mengapa terjadi ketertinggalan kedudukan dan peranan wanita dalam program pembangunan".

PEMBAHASAN

Umumnya kebudayaan masyarakat di negara-negara berkembang didominasi kuat peran laki-laki atau disebut budaya patriarkhi, sehingga posisi perempuan terhadap laki-laki tidak setara. Masyarakat beranggapan bahwa perempuan memiliki ciri-ciri lemah, halus atau lembut, emosional, dan sebagainya, sedangkan laki-laki memiliki ciri-ciri kuat, kasar, rasional dan sebagainya. Akibat dari pandangan yang demikian maka muncullah perbedaan status dan peranan laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat yang disebut gender. Jadi gender adalah konstruksi masyarakat tentang perbedaan status dan peranan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan kebudayaan yang mereka miliki.

Istilah gender berasal dari bahasa Latin (*genus*), artinya jenis atau tipe. Kemudian istilah ini dipergunakan untuk jenis kelamin (laki-laki atau perempuan). Dalam kamus bahasa Inggris istilah ini juga diberi arti jenis kelamin. Istilah gender belum masuk dalam perbendaharaan kata Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tetapi dalam pemakaian berikutnya istilah ini selalu dikaitkan dengan budaya. Istilah gender lebih banyak menunjuk kepada perbedaan status dan peranan laki-laki dan perempuan yang terbentuk dalam proses sosial dan budaya yang panjang. (Sinulingga, 2006:47).

Umar (1999: 35), memberikan pengertian gender sebagai suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial budaya. Dengan demikian, Gender berkaitan dengan konsepsi bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperan sesuai dengan nilai-nilai dalam kebudayaannya, berbeda dengan konsep jenis kelamin, meskipun kata gender berasal dari bahasa Inggris yaitu "gender" yang berarti jenis kelamin. Konsep gender mengakibatkan adanya perbedaan peran sosial antara laki-laki dan perempuan

yang dapat berubah dari waktu ke waktu atau dari satu tempat ke tempat lain. Perubahan ini dipengaruhi oleh kemajuan pendidikan, teknologi, ekonomi, lingkungan dan sebagainya.

Di dalam buku yang berjudul *Sex and Gender* yang ditulis oleh Hilary M. Lips, mengartikan bahwa gender adalah harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Hal ini dapat dilihat, misalnya bahwa perempuan dikenal dengan lemah lembut, cantik, emosional dan keibuan. Sementara laki-laki sebaliknya, yaitu dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Ciri-ciri dari sifat itu merupakan sifat yang dapat dipertukarkan, misalnya ada laki-laki yang lemah lembut, ada perempuan yang kuat, rasional dan perkasa. Perubahan ciri dari sifat-sifat tersebut dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain (Fakih 1999: 8-9).

Peran gender juga dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan, misalnya mengasuh anak, mencuci pakaian yang biasanya dilakukan oleh perempuan (ibu) dapat digantikan oleh laki-laki (ayah). Sebaliknya pekerjaan seperti mencangkul, menebang pohon yang biasanya dilakukan oleh laki-laki (ayah) dapat dilakukan oleh wanita (ibu). Konsep perbedaan jenis kelamin mengakibatkan adanya perbedaan sifat dan peran kodrati sebagai ciptaan Tuhan sehingga tidak dapat berubah sepanjang masa dan tidak dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan. Sifat kodrati perempuan adalah mensturasi, menopause dan peran kodratinya adalah mengandung, melahirkan, menyusui, sedangkan peran kodrati laki-laki adalah membuahi sel telur.

Konsep perbedaan jenis kelamin mengakibatkan adanya perbedaan sifat dan peran kodrati sebagai ciptaan Tuhan sehingga tidak dapat berubah sepanjang masa dan tidak dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan. Sifat kodrati perempuan adalah mensturasi, menopause dan peran kodratinya adalah mengandung, melahirkan, menyusui, sedangkan peran kodrati laki-laki adalah membuahi sel telur.

Laki-laki dan perempuan pada dasarnya mempunyai persamaan kedudukan, hak, kewajiban dan kesempatan, baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara maupun dalam kegiatan pembangunan di segala bidang. Tetapi karena adanya konsep perbedaan gender yang masih demikian kuatnya dalam pandangan masyarakat, mengakibatkan adanya perbedaan peran sosial antara laki-laki dan perempuan. Masyarakat menempatkan status dan peranan laki-laki di sektor publik yaitu sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah, sedangkan perempuan ditempatkan di sektor domestik yaitu sebagai ibu rumah tangga dan melaksanakan pekerjaan urusan rumah tangga.

Akibatnya adalah kaum perempuan mengalami eksklusi sosial yaitu proses yang menghalangi atau menghambat individu dan keluarga, kelompok dan kampung dari sumber daya yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, ekonomi dan politik di dalam masyarakat dengan utuh.

Eksklusi sosial adalah proses yang menghalangi atau menghambat individu dan keluarga, kelompok dan kampung dari sumber daya yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan politik di dalam masyarakat dengan utuh. Proses ini terutama sebagai konsekuensi dari kemiskinan dan penghasilan yang rendah, tetapi bisa juga dampak dari faktor lain seperti diskriminasi, tingkat pendidikan yang rendah, dan merosotnya kualitas lingkungan. Melalui proses inilah individu atau kelompok masyarakat untuk beberapa periode waktu kehidupan terputus dari layanan, jejaring sosial, dan peluang berkembang yang sebenarnya dinikmati sebagian besar masyarakat (Pierson, 2002).

Dari paparan di atas, ketika eksklusi sosial ada, mengakibatkan salah satunya yaitu deskriminasi terhadap perempuan, yaitu rendahnya peranan perempuan di dalam pembangunan, karena hak dan kewajiban yang dijalankan kaum perempuan di dalam pembangunan baik pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan

keamanan yang sangat berbeda. Maka terciptalah ketidaksetaraan gender atau ketidakadilan gender dalam pembangunan, sehingga merupakan bias gender dalam program pembangunan. Fakih (1999:12) akibat dari ketidakadilan gender tersebut antara lain: 1) marginalisasi perempuan, 2) penempatan perempuan pada subordinat, 3) stereotype perempuan, 4) kekerasan (*violence*) terhadap perempuan, dan 5) beban kerja tidak proposional.

Pertama adalah marjinalisasi. Marjinalisasi yaitu suatu proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kemiskinan, misalnya kaum perempuan yang bekerja di sektor publik sering diberi upah yang lebih rendah dari laki-laki karena dianggap hanya sebagai pencari nafkah tambahan. Meskipun kemiskinan merupakan pengalaman hidup yang dapat dialami oleh siapapun namun pemiskinan secara sistemik justru sering dialami oleh perempuan. Bentuk subordinasi terhadap perempuan yang menonjol adalah bahwa semua pekerjaan yang dikategorikan sebagai reproduksi dianggap lebih rendah dan menjadi subordinasi dari pekerjaan produksi yang dikuasai kaum lelaki (Sugiarti 2002:16-17).

Kedua adalah subordinasi. Subordinasi yaitu suatu anggapan yang memandang bahwa perempuan itu irasional dan emosional sehingga tidak dapat memimpin. Istilah ini mengacu kepada peran dan posisi perempuan yang lebih rendah dibandingkan peran dan posisi laki-laki. Subordinasi perempuan berawal dari pembagian kerja berdasarkan gender dan dihubungkan dengan fungsi perempuan sebagai ibu. (<http://www.koalisiperempuan.or.id/subordinasi/>)

Oleh sebab itu perempuan harus ditempatkan pada posisi yang tidak penting, misalnya perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena nanti akan mengurus dapur. Sering kita dengar bahwa jika keuangan suatu rumah tangga terbatas dan mereka harus mengambil keputusan untuk menyekolahkan anak-anaknya, maka anak laki-laki akan

mendapat prioritas utama. Praktek seperti ini tentunya berasal dari suatu ketidakadilan terhadap posisi perempuan terhadap laki-laki atau suatu praktek subordinasi.

Ketiga adalah stereotype. Miller dalam (Haslam, et.al., 1994: th) menyatakan bahwa stereotip memiliki dua macam konotasi: rigiditas dan duplikasi atau kesamaan, ketika dikaitkan dengan sikap dan perilaku manusia. Dengan demikian stereotip merupakan sesuatu yang rigid yang merangkum keragaman sikap dan perilaku tersebut ke dalam sebuah karakteristik yang sama atas dasar etnisitas, nasionalitas maupun gender. (Zaduqisti, 2009: 74)

Perlakuan stereotype tersebut, misalnya perempuan dianggap cengeng dan suka digoda. Selanjutnya juga banyak hal yang terjadi dengan anggapan tentang perempuan di masyarakat, adanya anggapan bahwa tugas utama perempuan adalah melayani suami. Dengan demikian, maka posisi perempuan dikonstruksikan sebagai makhluk yang lemah sehingga perlu dilindungi, kelihatan sedemikian kurang mandiri, tidak rasional, dalam menghadapi persoalan selalu hanya mengandalkan perasaan, dan lain-lain.

Akibat adanya stereotipi (pelabelan) ini banyak tindakan yang seolah-olah sudah merupakan kodrat. Misalnya: karena secara sosial budaya laki-laki dikonstruksikan sebagai kaum yang kuat, maka laki-laki mulai kecil biasanya terbiasa atau berlatih untuk menjadi kuat. Perempuan yang sudah terlanjur mempunyai label lemah lembut, maka perlakuan orang tua mendidik anak seolah-olah memang mengarahkan untuk terbentuknya perempuan yang lemah lembut (Sugiarti 2002:17-18).

Konsekuensi demikian itu, menyebabkan munculnya batasan-batasan dengan menempatkan perempuan pada ruang yang penuh aturan-aturan baku dan harus dijalankan. Konsep pembakuan peran gender yang mengotak-kotakkan peran laki-laki atau suami dan perempuan atau istri ini hanya memungkinkan perempuan berperan di wilayah domestik yakni sebagai pengurus

rumah tangga sementara laki-laki di wilayah publik sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah utama. Padahal, banyak sisi positif dari perempuan yang membedakannya dengan laki-laki dan jarang diekspos, misalnya watak dan karakter perempuan yang mampu mengendalikan diri, penuh dengan kekuatan emosi, dan punya kelebihan akan kepekaan sosial.

Keempat adalah timbulnya kekerasan yang merupakan tindak kekerasan baik yang bersifat fisik maupun non fisik, ekonomi maupun seksual oleh laki-laki terhadap perempuan karena dianggap sebagai makhluk lemah. Kekerasan yang timbul diakibatkan dariketiga factor sebelumnya, juga karena anggapan bahwa laki-laki mendominasi dan pemegang utama dari berbagai sector kehidupan.

Kekerasan fisik tersebut bisa dilihat adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kekerasan seksual seperti pelecehan seksual, pencabulan, pemerkosaan, eksploitasi seksual pada dunia kerja, pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi dan pengrusakan organ reproduksi. Kekerasan psikis seperti penghinaan, sikap, ungkapan melalui verbal atau perkataan yang dapat menyebabkan sakit hati dan hal-hal yang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman.

Kelima adalah beban ganda. Beban ganda (*double burden*) artinya beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. (<http://worldhealth-bokepzz.blogspot.com/2012/04/pengertian-beban-ganda-double-burden.html>). Jika dilihat secara natural, pada dasarnya yang melahirkan adalah seorang perempuan, masih dianggap sebagai sebuah peran yang statis dan permanen. Meskipun pada perkembangan berikutnya sudah mulai adanya peningkatan jumlah perempuan yang bekerja di wilayah *public*. Akan tetapi hal tersebut tidak diiringi dengan berkurangnya beban mereka namun tidak diiringi dengan berkurangnya beban mereka di wilayah *domestic*, akan tetapi justru berada di dua wilayah tersebut. Upaya mereka

untuk hal tersebut adalah membagikan ranah pekerjaan tersebut kepada perempuan lain, seperti pembantu rumah tangga atau anggota keluarga perempuan lainnya. Namun demikian, tanggung jawabnya masih tetap berada di pundak perempuan.

Kurang berhasilnya program pembangunan yang dilaksanakan di negara-negara berkembang mengakibatkan dilakukannya evaluasi terhadap program-program yang telah dilakukan. Salah satu faktor yang ditemukan adalah karena rendahnya partisipasi kaum perempuan di dalam program pembangunan. Hal ini mendorong pemerintah di negara-negara berkembang untuk memunculkan paradigma baru di dalam program pembangunan mereka yaitu pembangunan yang berwawasan gender.

Untuk konteks pembangunan, isu tentang perempuan dan pembangunan menjadi sedemikian penting karena selama ini perempuan pada umumnya termarginalkan. Hal tersebut dikarenakan negara masih kurang tepat dalam menempatkan perempuan perempuan pada peran tradisional begitu juga aktifitas-aktifitas yang dilakukan perempuan. Selain itu, negara juga secara relatif tidak diperhitungkan dalam usaha-usaha pembangunan tidak menikmati hasil-hasilnya sebagaimana yang didapat oleh laki-laki. (Antrobus, 2004: 47).

Beberapa pendekatan yang menginginkan keikutsertaan kaum perempuan di dalam program pembangunan atau pembangunan yang berwawasan gender, antara lain:

Pertama adalah Perempuan Dalam Pembangunan (*Women In Development-WID*). Pendekatan WID muncul pada dekade 70-an sebagai produk dari gerakan kaum feminis liberal Amerika yang melihat bahwa kaum perempuan diabaikan dan tereksklusi dari program pembangunan. Para penganut pendekatan WID yakin bahwa pembangunan tidak akan terjadi jika perempuan tidak dimasukkan di dalam proses pembangunan. Oleh sebab itu untuk mengatasi marginalisasi perempuan, mereka memperjuangkan

penerapan proyek pembangunan terpisah atau terintegrasi untuk kaum perempuan. Asumsi yang mereka kemukakan adalah jika kaum perempuan mendapat akses pada sumber daya seperti kredit, pelatihan, kegiatan peningkatan penghasilan maka kaum perempuan akan mampu meningkatkan posisinya sejajar dengan laki-laki. Penerapan konsep WID ini ternyata tidak membawa perubahan yang signifikan terhadap partisipasi perempuan dalam pembangunan. Hal ini disebabkan oleh budaya patriarkhi yang membelenggu kebanyakan penduduk negara berkembang, menimbulkan peran sosial budaya dan ekonomi kaum perempuan tersubordinasi oleh laki-laki

Kedua adalah Perempuan dan Pembangunan (*Women And Development-WAD*), Kegagalan pendekatan WID dalam memperjuangkan perbaikan posisi kaum perempuan perempuan dalam pembangunan, menyebabkan perlunya pendekatan lain yang disebut pendekatan Perempuan Dan Pembangunan (*Women And Development-WAD*). Para pendukung pendekatan WAD berpendapat bahwa kaum perempuan tidak akan pernah mendapatkan bagian dari manfaat pembangunan yang adil dan merata jika pengaruh budaya patriarkhi belum dapat diatasi. Mereka melihat bahwa mengatasi kemiskinan dan dampak kolonialisme juga penting untuk mempromosikan persamaan gender dalam proses pembangunan. Pendekatan WAD ternyata juga gagal dalam mempengaruhi akses kaum perempuan dalam program pembangunan.

Ketiga adalah Gender dan Pembangunan (*Gender And Development-GAD*). Kegagalan pendekatan WID dan WAD menyebabkan pada tahun 1980-an muncul pendekatan Gender dan Pembangunan (*Gender And Development-GAD*). Para pendukung pendekatan GAD melihat bahwa terjadi subordinasi perempuan di bawah pengaruh ayah dan suami mereka. Oleh sebab itu dengan meningkatkan akses perempuan pada layanan publik dapat mengatasi persoalan subordinasi tersebut. Pendukung pendekatan GAD berpendapat bahwa nilai peran produksi (kerja berbayar dan kerja tak berbayar) serta

peran reproduksi (melahirkan dan merawat anak) para ibu rumah tangga dapat memberikan manfaat pada rumah tangga dan industri. Tujuan akhir pendekatan GAD adalah terjadinya pergeseran hubungan kekuasaan yang akan memberikan otonomi lebih besar terhadap kaum perempuan. Kesetaraan dan keadilan gender masih sulit untuk dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya kaum perempuan. Oleh sebab itu pemerintah telah mengambil kebijakan, tentang perlu adanya strategi yang tepat sehingga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Strategi ini disebut *Pengarusutamaan Gender (Gender Mainstreaming)* yang tertuang di dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional sampai daerah. Dengan strategi Pengarusutamaan Gender ini, pemerintah dapat melahirkan kebijakan-kebijakan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat, baik pria maupun wanita. Melalui strategi ini, diharapkan program pembangunan yang akan dilaksanakan akan menjadi lebih sensitif atau responsif gender, sehingga mampu menegakkan hak-hak dan kewajiban kaum perempuan atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama dan penghargaan yang sama di masyarakat secara operasional.

Pengarusutamaan gender dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dibangun untuk mengintegrasikan kebijakan gender dalam program pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi. Pengarusutamaan Gender, bertujuan untuk terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender.

SIMPULAN

Meskipun strategi Pengarusutamaan Gender (PUG), memang sudah dilaksanakan di berbagai kebijakan pemerintah, baik ditingkat nasional maupun daerah, namun sampai saat ini, tidak semua bisa terlaksanakan dan sesuai

dengan harapan. Evaluasi memang terus menerus dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan tentang pelaksanaan PUG. Sepertinya kendala yang dihadapi justru berada pada wilayah struktural politik dari pemerintah sendiri tidak responsif gender dan ditunjang pula oleh aparat yang belum sensitif gender.

Di sisi lain, konsep gender juga masih belum menyeluruh terintegrasi ke dalam proses pembangunan. Budaya lokal, etnisitas, kesukuan, status sosial, agama, masih merupakan hambatan yang dapat mempengaruhi kesetaraan perempuan di dalam proses pembangunan. Oleh sebab itu kaum perempuan masih perlu berusaha untuk memperjuangkan kesetaraan posisinya dengan kaum laki-laki di dalam setiap program pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I, ed. 2001. Seks, Gender dan Reproduksi Kekuasaan. Yogyakarta: Tarawang.
- Antrobus, P. 2004, *The Global Women's Movement*, Bangladesh: The University Press,
- Echols, J.M. dan Hassan S. 1995. *Kamus Inggris-Indonesia*, Cet. XXI, Jakarta: Gramedia
- Fakih, M. 1996. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Handayani, Trisakti dan Sugiarti. 2002. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. Malang: Universitas Muhammadiyah Press.
- Haslam, *et.al.*, *Stereotyping and Social Reality*. (UK: Basil Blackwell Limited, 1994).
- Ihromi, T.O. 1999. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Obor
- Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
- Kartasmita, G. 1997. *Kemiskinan*. Jakarta: Balai Pustaka
- _____. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat (Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan)*, CIDES, Jakarta, 1996.
- Mosse, J. C. 2007. *Gender & Pembangunan*. Yogyakarta: Pen. Pustaka Pelajar
- Nugroho, R. 2011. *Gender dan Pengarusutamaannya Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sinulingga, R. 2006, *Jurnal Wawasan*, Juni, Volume 12, Nomor 1. Medan: USU.
- Utama, A.S dkk, "Review Social Exclusion: A Concept In Need Of Definition?" Robin Peace," paper dari <http://xa.yimg.com/kq/groups/69248363/1972656777/name/Paper+presentasi+part+1.docxs>.
- Pierson, J. 2002. *Tackling Social Exclusion*. London and New York: Routledge.
- Umar, N. 1999. *Argumen Kesetaraan Gender* Jakarta: Paramadina
- Zaduqisti, E. 2009. *Jurnal Muwâzâh*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2009, STAIN Pekalongan. <http://www.koalisiperempuan.or.id/subordinasi/>